PROBLEMATIKA PERATURAN HUKUM DAN STRATEGI PENANGGULANGAN PEREDARAN GARAM ILEGAL DI INDONESIA

Hermanus Marang Temaluru¹, Ferdinandus Lobo², Katarina Leonita Wea Tawa³
adeptemaluru@gmail.com¹, ferdinandlobo@unwira.ac.id², karinweatawa@gmail.com³
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Perdagangan garam ilegal di Indonesia mengancam industri garam legal dan kesehatan masyarakat karena sering tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Garam ilegal mengandung kontaminan berbahaya dan kadar yodium rendah, sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, implementasinya masih terkendala pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peraturan dan efektivitas implementasinya, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dan keamanan pangan masih belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi penanggulangan yang mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, dan edukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan konsumsi garam ilegal. Dukungan terhadap industri garam legal juga penting agar dapat bersaing dan mematuhi standar kualitas. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat adalah kunci dalam menyelesaikan masalah ini, termasuk peningkatan inspeksi, kesadaran masyarakat, dan transparansi distribusi garam. Upaya preventif dan penegakan hukum yang komprehensif diharapkan dapat mengurangi dampak negatif perdagangan garam ilegal serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Garam Ilegal, Standar Nasional Indonesia Pengawasan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Illegal salt trade in Indonesia poses a threat to the legal salt industry and public health because it often fails to meet the Indonesian National Standard (SNI). Illegal salt contains harmful contaminants and low iodine levels, leading to various health issues. Despite regulations such as Law No. 7 of 1996 on Consumer Protection and Law No. 18 of 2012 on Food, implementation is hindered by ineffective supervision and law enforcement. This study uses a normative juridical approach to examine regulations and their implementation effectiveness, revealing that consumer protection and food safety are far from optimal. To address this issue, countermeasures are needed, including enhanced supervision, stricter law enforcement, and public education on the health risks of consuming illegal salt. Support for the legal salt industry is also crucial to help it compete and comply with quality standards. Collaboration between the government, industry, and society is key to resolving this issue, involving increased inspections, public awareness, and transparency in salt distribution. Comprehensive preventive efforts and law enforcement are expected to reduce the negative impact of illegal salt trade and improve public health and well-being in Indonesia.

Keywords: *Illegal salt trade, Indonesian National Standard, Supervision, Law enforcement.*

PENDAHULUAN

Perdagangan garam ilegal telah menjadi masalah yang kompleks dan mendesak di Indonesia, mengancam keberlanjutan industri garam yang legal serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Garam, sebagai bahan konsumsi pokok dan bahan baku industri yang vital, memainkan peran krusial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perdagangan garam ilegal tidak hanya merugikan dari segi ekonomi dan perundang-undangan, tetapi juga

menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Garam yang legal harus mematuhi standar kualitas yang ketat, seperti yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk garam konsumsi. Menurut SNI, garam harus memiliki kadar natrium klorida (NaCl) minimum 94,7% dan kadar yodium minimal 30 ppm. Selain itu, garam harus bebas dari kontaminan berbahaya seperti logam berat yang dapat membahayakan kesehatan. (Wibowo, 2021) Proses produksi juga harus mematuhi standar kebersihan dan sanitasi untuk mencegah kontaminasi selama produksi dan pengemasan. Produsen wajib melakukan uji laboratorium secara rutin untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar ini sebelum diedarkan ke pasar.

Di Indonesia, regulasi terkait perdagangan garam telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek-aspek penting dari produksi, distribusi, hingga konsumsi garam. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting yang menjamin hak konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. (Rivianto, 2023) Selanjutnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur secara khusus pengawasan terhadap bahan pangan, termasuk garam, untuk memastikan keamanan konsumsi masyarakat. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 58/M-DAG/PER/8/2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21/PERMEN-KP/2013 turut menguatkan kontrol terhadap produksi, peredaran, dan distribusi garam di Indonesia. (Ayunda, 2016) Regulasi ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar kualitas serta pengawasan yang ketat untuk melindungi konsumen dari produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Permasalahan perdagangan garam ilegal di Indonesia tidak hanya bersifat ekonomis atau terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi semata, tetapi juga mengandung risiko kesehatan yang sangat serius bagi masyarakat. Garam ilegal sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, seperti kadar natrium klorida (NaCl) yang rendah dan kandungan yodium yang kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena garam yang tidak memenuhi standar tersebut dapat menyebabkan defisiensi gizi yang berpotensi membahayakan kesehatan, terutama pada konsumsi jangka panjang.

Selain itu, garam ilegal juga berpotensi mengandung kontaminan berbahaya seperti logam berat, yang dapat merusak organ dalam tubuh manusia dan menyebabkan berbagai penyakit kronis. (Armadi et al., 2023) Kehadiran kontaminan ini merupakan ancaman serius terhadap kesehatan konsumen, karena eksposur kronis terhadap logam berat dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan perdagangan garam ilegal di Indonesia. Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap produksi, distribusi, dan peredaran garam, serta memastikan bahwa semua produk garam yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif perlu diterapkan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif dan melindungi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Rositawati, 2013)

Strategi penanggulangan perdagangan garam ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, industri garam legal, dan masyarakat umum. Upaya penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini, untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi, distribusi, dan konsumsi garam diawasi secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-

langkah ini mencakup peningkatan inspeksi di pelabuhan dan pasar, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan garam yang legal dan aman, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan penindakan terhadap praktik perdagangan garam ilegal.

Dalam konteks ini, peran edukasi dan sosialisasi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam upaya mengatasi permasalahan perdagangan garam ilegal di Indonesia. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi garam ilegal yang tidak memenuhi standar kualitas. Edukasi ini tidak hanya mencakup informasi mengenai standar SNI dan bahaya kontaminasi garam ilegal oleh logam berat, tetapi juga mengenai manfaat menggunakan garam yang legal dan aman bagi kesehatan. Melalui kampanye sosialisasi yang efektif, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas, dan media massa, masyarakat dapat lebih peka terhadap pentingnya memilih produk garam yang terjamin kualitasnya.

Selain edukasi, dukungan yang berkelanjutan terhadap industri garam legal juga merupakan langkah penting. Produsen garam legal perlu didukung dengan pembinaan dan pendampingan untuk mematuhi regulasi yang ada, termasuk dalam hal pengujian laboratorium rutin untuk memastikan kualitas produk mereka. Pemerintah juga dapat memfasilitasi akses pasar yang adil bagi produk garam legal, dengan memperkuat sistem distribusi yang mengutamakan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan industri terhadap standar kualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing produk garam legal di pasaran domestik maupun internasional. Dengan demikian, kombinasi strategi edukasi masyarakat dan dukungan terhadap industri garam legal menjadi krusial dalam mengatasi perdagangan garam ilegal, memastikan keamanan konsumsi garam bagi masyarakat, serta memperkuat keberlanjutan industri garam di Indonesia.

Secara keseluruhan, penanggulangan perdagangan garam ilegal bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menjadi isu sosial dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons komprehensif dari berbagai sektor. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini dan bekerjasama secara sinergis, diharapkan bahwa upaya bersama dapat berhasil mengurangi dampak negatif perdagangan garam ilegal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta memastikan keberlanjutan industri garam yang legal.

METODOLOGI

Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. (Anggito, 2018, p. hlm. 23) Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi dan menjelaskan apa yang diatur oleh hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan berdasarkan norma-norma yang ada. Metode ini sering kali melibatkan penggunaan pendekatan filosofis, analitis, dan deduktif untuk mengembangkan argumentasi hukum dan mengevaluasi konsistensi serta keadilan dari suatu aturan hukum. (Muhaimin, 2020, p. hlm. 12) Penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah perdagangan garam ilegal. Pertama-tama, metode ini memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum penting dalam menjamin hak konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dalam konteks garam, perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang

ditetapkan menjadi fokus utama penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian hukum yuridis normatif akan mengkaji Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara mendalam. Undang-undang ini mengatur pengawasan terhadap bahan pangan, termasuk garam, dengan tujuan untuk memastikan keamanan konsumsi masyarakat. Analisis terhadap implementasi undang-undang ini dalam praktik pengawasan terhadap garam ilegal menjadi krusial dalam menilai efektivitas regulasi dalam memenuhi tujuan perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

Melalui pendekatan yuridis normatif, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 58/M-DAG/PER/8/2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21/PERMEN-KP/2013 akan dianalisis secara mendalam. Peraturan-peraturan ini mengatur tentang kontrol terhadap produksi, peredaran, dan distribusi garam di Indonesia, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait standar kualitas dan pengawasan terhadap produk garam. Evaluasi terhadap implementasi peraturan ini akan memberikan gambaran tentang kepatuhan produsen dan distributor garam terhadap regulasi yang berlaku serta efektivitas penerapan pengawasan oleh pihak berwenang.

Dalam konteks risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh garam ilegal, metode penelitian ini memungkinkan untuk mengevaluasi dampak dari pelanggaran terhadap regulasi kesehatan masyarakat. Garam ilegal sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, seperti kadar natrium klorida (NaCl) yang rendah atau kekurangan kandungan yodium yang dapat mengakibatkan defisiensi gizi. Analisis terhadap implikasi kesehatan masyarakat dari konsumsi garam ilegal menjadi penting untuk menyoroti risiko kesehatan yang ditimbulkan dan urgensi perlindungan terhadap konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Peraturan Hukum Mengenai Peredaran Garam Ilegal

a. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Dalam menangani peredaran garam ilegal, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang mengatur ketentuan umum mengenai pangan, termasuk garam sebagai salah satu bahan pokok yang harus diawasi kualitas dan peredarannya. Undang-undang ini menekankan pentingnya keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pasal 36 secara khusus mengatur bahwa semua pangan yang beredar harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini mencakup aspek-aspek seperti kandungan gizi, kebersihan, serta bebas dari bahan berbahaya yang bisa merugikan kesehatan konsumen. (UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, 1996)

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/8/2012 tentang Ketentuan Impor Garam mengatur ketentuan dan prosedur impor garam. Peraturan ini mencakup berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh importir agar dapat melakukan impor garam. Syarat-syarat tersebut termasuk keharusan memiliki izin impor yang sah, mematuhi standar kualitas dan keamanan yang berlaku, serta memastikan bahwa garam yang diimpor tidak merugikan produksi garam lokal. Pasal 3 dalam peraturan ini menyatakan bahwa hanya importir yang terdaftar resmi yang diizinkan untuk melakukan impor garam, sehingga meminimalisir kemungkinan masuknya garam ilegal atau berkualitas rendah ke pasar domestik. (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2012)

Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Kelola Garam Nasional bertujuan untuk meningkatkan produksi garam nasional dan mengatur tata kelola peredarannya. Peraturan ini memberikan panduan bagi

produsen garam lokal mengenai cara meningkatkan produksi dan kualitas garam mereka. Pasal 5 dari peraturan ini menetapkan kewajiban bagi produsen dan distributor untuk melaporkan dan mencatat produksi serta distribusi garam mereka. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam industri garam, serta untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan stok garam nasional. (Pemerintah Republik Indonesia, 2013)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga relevan dalam konteks ini karena mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dijual. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang tidak aman atau berkualitas rendah. Pasal 4 dan Pasal 7 dalam undang-undang ini memberikan konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, termasuk garam. Ini berarti bahwa pelaku usaha harus memastikan bahwa garam yang mereka jual aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi hukum yang berat. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

Terakhir, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur sistem penyediaan pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasokan pangan dari produsen hingga konsumen berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pasal 68-71 dalam undang-undang ini mengatur pengawasan pangan, termasuk garam, serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran peredarannya. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan kualitas dan keamanan pangan yang beredar di pasar, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Sanksi yang diterapkan bisa berupa denda, penutupan usaha, atau hukuman pidana bagi pelaku yang terbukti melanggar. Dengan demikian, peraturan-peraturan ini bersama-sama memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani peredaran garam ilegal di Indonesia dan melindungi konsumen dari bahaya produk yang tidak memenuhi standar. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 2012)

b. Analisis Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Peraturan-peraturan yang mengatur penanggulangan peredaran garam ilegal melibatkan berbagai aspek penting yang memerlukan analisis mendalam. Salah satu aspek krusial adalah Keamanan dan Mutu Pangan, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pasal 36 dalam UU No. 7 Tahun 1996 menetapkan bahwa pangan yang beredar di Indonesia harus mematuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa garam yang dikonsumsi masyarakat tidak mengandung bahan berbahaya dan memiliki kualitas yang layak. Namun, meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan, penerapannya sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pengawasan yang kurang memadai, dan koordinasi yang belum optimal antara lembaga terkait.

UU No. 18 Tahun 2012, khususnya Pasal 68-71, mengatur pengawasan terhadap pangan, termasuk garam, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Namun, efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, adil, dan tidak pandang bulu.

Dalam hal impor garam, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/8/2012 mengatur bahwa impor garam hanya boleh dilakukan oleh importir yang

terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ketat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kualitas garam yang masuk ke Indonesia serta mencegah peredaran garam ilegal yang merugikan konsumen dan merusak pasar domestik. Namun, kendala dalam pengawasan, seperti celah birokrasi dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan impor, sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengimpor garam ilegal

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Kelola Garam Nasional mengatur pelaporan dan pencatatan produksi serta distribusi garam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai distribusi garam, mulai dari produksi hingga konsumsi. Namun, implementasi aturan ini sering menghadapi tantangan dalam bentuk kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan, serta keterbatasan dalam sistem pelaporan yang terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang penting dalam melindungi hak-hak konsumen terhadap produk yang aman dan berkualitas. Pasal 4 dan Pasal 7 UU ini menetapkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan produk yang dijual kepada konsumen. Namun, kesadaran konsumen akan hak-hak mereka seringkali masih rendah, dan prosedur pengaduan terkait produk tidak selalu mudah diakses atau dipahami.

Pengawasan dan sanksi terkait penanggulangan peredaran garam ilegal diatur kembali dalam UU No. 18 Tahun 2012 pada Pasal 68-71. Meskipun regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan pangan dan pemberian sanksi bagi pelanggar, implementasi di lapangan seringkali belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Berbagai tantangan seperti korupsi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan anggaran yang terbatas menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

2. Strategi Penanggulangan Mengenai Peredaran Garam Ilegal

a. Konteks Regulasi Terkait Keamanan dan Mutu Pangan

Peraturan-peraturan yang mengatur penanggulangan peredaran garam ilegal di Indonesia mengintegrasikan aspek penting terkait Keamanan dan Mutu Pangan, yang diatur secara rinci oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pasal 36 dari UU No. 7 Tahun 1996 secara tegas menegaskan bahwa setiap pangan yang beredar di Indonesia harus mematuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Regulasi ini menjadi pijakan penting untuk menjamin bahwa garam yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak mengandung bahan berbahaya dan memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Namun demikian, implementasi dari peraturan ini sering menghadapi tantangan yang signifikan. Lembaga pengawas seperti BPOM sering kali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan yang intensif dan mendeteksi adanya garam ilegal secara efektif. Kurangnya infrastruktur pengawasan yang memadai juga menjadi kendala serius, yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga terkait dalam menjalankan tugas pengawasan mereka dengan efisien dan konsisten. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait masih perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa standar keamanan dan mutu pangan diterapkan secara merata dan menyeluruh di seluruh rantai distribusi.

Penguatan implementasi peraturan-peraturan ini memerlukan upaya kolaboratif yang lebih terintegrasi antara berbagai lembaga terkait dan pihak swasta. Perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengawas, melalui pelatihan yang berkelanjutan dan penambahan personel yang terlatih. Selain itu,

investasi dalam infrastruktur pengawasan yang modern dan efisien menjadi krusial untuk mendukung kegiatan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. Koordinasi yang lebih erat antar lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BPOM, juga diperlukan guna mengatasi tantangan overlapping regulasi dan memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi garam secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa penerapan standar keamanan dan mutu pangan terhadap garam dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi garam dengan keyakinan akan keamanan dan kualitasnya.

b. Peran Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 dalam Pengawasan Pangan

Undang-undang No. 18 Tahun 2012, terutama dalam Pasal 68-71, mengatur dengan tegas pengawasan terhadap pangan, termasuk garam, serta menetapkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran guna mencegah praktik ilegal yang merugikan konsumen dan mengganggu ketertiban pasar. Namun, implementasi yang efektif dari regulasi ini memerlukan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan tanpa pandang bulu. Tantangan utama yang dihadapi adalah korupsi di tingkat pelaksanaan yang dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung pengawasan yang intensif.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran garam ilegal di Indonesia, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan. Penguatan integritas lembaga pengawas menjadi krusial guna mengatasi praktek korupsi yang melemahkan penegakan hukum. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan, serta melindungi konsumen dari praktik ilegal yang merugikan.

c. Regulasi Impor Garam dan Kendala dalam Pengawasan

Regulasi terkait impor garam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/8/2012, bertujuan untuk mengawasi masuknya garam ke Indonesia dengan mengontrol kualitasnya dan menghalangi peredaran garam ilegal. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi celah birokrasi yang sering dimanfaatkan untuk memasukkan garam ilegal ke dalam negeri. Diperlukan upaya keras dalam melakukan audit yang ketat dan pemeriksaan mendalam terhadap para importir yang beroperasi, guna memastikan bahwa proses impor garam hanya dilakukan oleh pihak yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses perizinan impor juga sangat penting guna mengurangi potensi penyalahgunaan dan memperkuat disiplin dalam menerapkan regulasi tersebut.

Regulasi ini juga menggarisbawahi perlunya kejelasan dalam pengaturan izin impor, mengingat peran transparansi dalam menekan praktik-praktik yang tidak sah serta memperteguh komitmen terhadap penegakan hukum. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga terkait agar pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi impor garam dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, pendekatan yang berbasis risiko dan penguatan sistem pemantauan secara keseluruhan akan membantu meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap masuknya garam ilegal. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik serta mendorong pertumbuhan industri garam yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas.

d. Tata Kelola Garam Nasional dan Tantangan Implementasinya

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2013 mengatur secara komprehensif mengenai tata kelola garam nasional di Indonesia. Salah satu fokus

utama peraturan ini adalah mengatur prosedur pelaporan dan pencatatan produksi serta distribusi garam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai distribusi garam di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini seringkali menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha terhadap kewajiban mereka untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu dan akurat.

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang belum terintegrasi dengan baik antar lembaga terkait. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memantau secara efektif seluruh proses produksi dan distribusi garam di berbagai daerah. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, sehingga memungkinkan pelaporan yang lebih efisien dan pemantauan yang lebih akurat terhadap seluruh rantai produksi dan distribusi garam di Indonesia.

Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak terkait juga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan garam yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Hal ini mencakup kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya terwujud dalam bentuk teori tetapi juga dalam praktek yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2013 harus diiringi dengan langkah-langkah konkret untuk membangun kapasitas, meningkatkan kesadaran, dan memperbaiki sistem kolaborasi antar lembaga terkait.

e. Perlindungan Konsumen dalam Konteks Garam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pentingnya memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen terhadap produk-produk yang aman dan berkualitas, termasuk garam. Meskipun demikian, kesadaran akan hak-hak konsumen sering kali masih rendah di masyarakat. Proses pengaduan terkait produk juga tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh konsumen. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang ini, diperlukan penguatan dalam mekanisme pengaduan konsumen agar lebih transparan dan mudah diakses, serta pendidikan kontinu kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memilih produk yang tidak hanya aman tetapi juga legal.

Penguatan mekanisme pengaduan konsumen akan membantu memperjelas prosedur yang harus diikuti oleh konsumen ketika menghadapi masalah terkait produk yang mereka beli. Dengan demikian, konsumen akan lebih percaya diri untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi, sehingga memberikan tekanan lebih besar kepada produsen dan penjual untuk mematuhi standar kualitas dan keamanan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, pendidikan terus-menerus kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memilih produk yang aman dan legal akan membantu mengurangi permintaan terhadap garam ilegal atau tidak terjamin mutunya.

Selain mengedukasi konsumen, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pasar garam untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar yang beredar di pasaran. Dengan demikian, penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perubahan perilaku konsumen dan produsen dalam menjaga kualitas dan keamanan produk garam di Indonesia.

f. Penegakan Hukum dan Tantangan Korupsi

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran garam ilegal menghadapi tantangan serius, termasuk masalah korupsi di kalangan aparat pengawas. Praktik korupsi dapat merusak efektivitas upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat integritas organisasi melalui implementasi sistem pengawasan internal yang lebih ketat. Selain itu, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan upaya pengawasan. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi peluang bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas yang bertanggung jawab.

Implementasi sistem pengawasan internal yang lebih ketat akan membantu meminimalkan celah bagi praktek korupsi di dalam lembaga pengawas. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan dapat mendorong integritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, pentingnya penegakan sanksi yang tegas tidak hanya sebagai bentuk efek jera bagi pelaku korupsi, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan sinyal kuat bahwa praktek korupsi tidak akan ditoleransi dalam konteks penegakan hukum. Dengan demikian, langkah-langkah ini akan berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran garam ilegal serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pengawas yang bertugas menjaga kepatuhan terhadap regulasi.

g. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Instansi Terkait

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perdagangan, menjadi sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan jumlah petugas pengawas yang terlatih dan berkompeten serta penyediaan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan investasi dalam pelatihan reguler untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi peredaran garam ilegal dan penanganan kasus secara efektif, sehingga memastikan penegakan hukum yang berkesinambungan dan efisien.

Dalam konteks ini, kolaborasi antarinstansi juga menjadi kunci. Koordinasi yang baik antara BPOM, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait lainnya akan memperkuat sistem pengawasan secara keseluruhan. Selain itu, penguatan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan yang lebih luas dan efektif. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pasar dan perlindungan konsumen secara menyeluruh melalui pengawasan yang lebih efektif dan proaktif.

h. Edukasi Publik dan Kesadaran Konsumen

Peningkatan kesadaran publik tentang bahaya garam ilegal serta pentingnya memilih produk yang aman dan legal merupakan sebuah upaya yang sangat diperlukan. Kampanye edukasi yang intensif perlu dilakukan untuk mendorong pemahaman masyarakat akan dampak negatif dari konsumsi garam ilegal terhadap kesehatan. Media massa, sekolah, dan lembaga masyarakat perlu lebih proaktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan relevan mengenai perbedaan kualitas garam serta hak-hak konsumen terkait. Selain itu, pentingnya memperkuat peran konsumen dalam mempertahankan kualitas produk yang mereka konsumsi melalui pemahaman yang lebih baik terhadap label dan informasi produk juga menjadi bagian integral dari strategi ini.

Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko garam ilegal, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih

produk yang mereka beli. Dengan pengetahuan yang lebih baik, konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berkelanjutan dalam memilih garam yang aman bagi kesehatan mereka. Penguatan peran konsumen dalam memonitor dan menilai kualitas produk akan membantu menciptakan pasar yang lebih sehat dan adil, di mana produsen didorong untuk mematuhi standar yang lebih tinggi dalam memproduksi garam yang aman dan legal. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam mengimplementasikan strategi ini menjadi krusial untuk mencapai tujuan keselamatan konsumen dan peningkatan kualitas produk secara keseluruhan.

i. Evaluasi dan Revisi Regulasi yang Berkelanjutan

Evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas regulasi saat ini menjadi semakin penting untuk mengakomodasi dinamika pasar dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Diperlukan revisi yang komprehensif, yang mencakup peningkatan signifikan dalam besaran sanksi yang dikenakan kepada pelanggar, perbaikan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap perubahan, serta upaya untuk menyederhanakan prosedur administratif guna mengurangi hambatan birokrasi yang memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menguatkan kerangka kerja regulasi yang ada, serta mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan melakukan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas regulasi, kita dapat memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan pasar yang berubah dengan cepat dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Revisi yang dibutuhkan seharusnya meliputi penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, peningkatan dalam sistem pengawasan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi dan menanggapi pelanggaran dengan lebih efisien, serta upaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi guna mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meminimalkan peluang untuk adanya pelanggaran. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga memperkuat kerangka kerja regulasi secara keseluruhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

j. Implementasi dan Monitoring yang Intensif

Pentingnya penerapan regulasi yang ketat dan pemantauan yang intensif terhadap seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi garam tidak bisa diabaikan. Dengan menerapkan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi, kita dapat meningkatkan pemantauan secara real-time dan melakukan analisis data yang lebih mendalam untuk mendeteksi serta menanggapi pelanggaran dengan lebih cepat dan efektif. Kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga terkait dan pihak swasta juga menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan efisiensi dalam setiap tahap pengelolaan garam.

Komitmen terhadap penerapan regulasi yang ketat dan pemantauan yang intensif terhadap industri garam sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk. Dengan adanya sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi, kita dapat memfasilitasi pemantauan yang lebih efisien dan analisis data yang lebih akurat untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dengan lebih tepat waktu. Lebih lanjut, kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, regulator, dan pihak swasta akan memperkuat kerangka kerja pengawasan, meningkatkan koordinasi dalam tindakan responsif, dan memastikan bahwa setiap aspek dari rantai pasok garam berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Peredaran garam ilegal di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi garam, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Permendag No. 58/M-DAG/PER/8/2012 tentang Pengelolaan Garam, dan Permen-KP No. 21/PERMEN-KP/2013 tentang Pengelolaan Garam Nasional menyediakan kerangka hukum yang kuat. Namun, efektivitasnya terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung implementasi regulasi tersebut.

Keamanan dan mutu pangan, terutama garam, menjadi fokus utama regulasi ini dengan menetapkan standar kualitas yang ketat. Namun, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur pengawasan yang kurang memadai menjadi kendala besar dalam implementasi peraturan tersebut. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga memperparah situasi ini. Tantangan dalam pengawasan impor garam juga muncul dari celah-celah birokrasi dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan, yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan garam ilegal ke pasar domestik.

Tata kelola garam nasional juga menghadapi masalah dalam hal kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan. Sistem pelaporan yang belum terintegrasi dengan baik antar lembaga terkait membuat pemantauan terhadap produksi dan distribusi garam menjadi tidak efektif. Perlindungan konsumen, yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan sulitnya akses terhadap mekanisme pengaduan yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih garam yang aman dan legal.

Penegakan hukum dalam menangani peredaran garam ilegal menghadapi tantangan serius, termasuk masalah korupsi di kalangan aparat pengawas. Korupsi ini merusak efektivitas upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Oleh karena itu, penguatan integritas organisasi dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi menjadi langkah krusial dalam memastikan keberhasilan pengawasan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Strategi penanggulangan peredaran garam ilegal memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup penguatan sumber daya manusia dan kapasitas instansi terkait, edukasi publik dan peningkatan kesadaran konsumen, serta evaluasi dan revisi regulasi yang berkelanjutan. Implementasi sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi dan kolaborasi erat antar lembaga terkait juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan dapat mengurangi peredaran garam ilegal dan meningkatkan keamanan serta mutu garam yang dikonsumsi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Armadi, A., Misbahudholam, M., AS, H. A., Wafa, A. S., Yasir, M., Fatah, M. K., & Fadila, F. (2023). Pengabdian Budidaya Garam Dan Dampak Dari Perluasan Wilayah Tambak Garam Beserta Penanaman Pohon Di Desa Galis Kec. Gili Genting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara)*, Vol. 5(3).

- Ayunda, R. (2016). Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Waralaba. Vol. 4(2).
- Menteri Peridagangan Republik Indonesia. (2012). Permendag/No. 125/2012.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/Permen-Kp/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- Rivianto. (2023). Review : Analisis Peredaran Penggunaan Pengawet Legal Dan Ilegal Yang Digunakan Pada Produk Pangan. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, Vol. 6(1), hlm. 5. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i1.18>
- Rositawati, A. (2013). Rekrystalisasi Garam Rakyat dari Daerah Demak untuk Mencapai SNI Garam Industri. *Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri*, Vol. 2(4).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, (2012).
- UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, (1996).
- Wibowo, A. (2021). Potensi Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Sni) Produk Garam Konsumsi Beryodium Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing. *Pertemuan Dan Presentasi Ilmiah Standardisasi*, 2020, hlm 81. <https://doi.org/10.31153/ppis.2020.95>